

## Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa

Imelda, Azwardi, Didik Susetyo, Emylia Yuniarti, Mardalena, Halia Butra Aini

Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Sriwijaya, Palembang, Indonesia

Email korespondensi: [imeldazainal@unsri.ac.id](mailto:imeldazainal@unsri.ac.id)

### Abstrak

*Kemampuan dan keterampilan perangkat Desa Ulak Kembahang II dalam pengelolaan keuangan desa masih terbatas, serta partisipasi masyarakat desa dalam tata kelola keuangan desa juga masih rendah. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi perangkat desa dalam mengelola keuangan desa dengan cara menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) berupa pendampingan manajemen dan teknis dalam pengelolaan keuangan desa. Kegiatan dilakukan dengan metode sosialisasi, edukasi, focus group discussion (FGD), dan bimbingan teknis. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pemahaman peserta dalam pengelolaan keuangan desa meningkat sebesar 78,5% pada 32 pertanyaan tentang perencanaan keuangan desa, penganggaran keuangan desa, pelaksanaan keuangan desa, serta pelaporan dan pertanggungjawaban dari pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian, kegiatan PKM ini berhasil meningkatkan kompetensi perangkat desa dalam mengelola keuangan desa sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan Dana Desa.*

### Abstract

*The ability and skills of the Ulak Kembahang II facility to manage village finances are still limited, as is the participation of the village community in village financial management. This research aims to improve the competence of the village equipment in managing the village's finances by organizing dedication activities to the community (PKM) as an accompanying management and technical component in managing village finances. Activities involve socialization methods, education, focus group discussion (FGD), and technical guidance. The evaluation results showed that participants' understanding of village financial management increased by 78.5% on 32 questions about village financial planning, village financial arrangement, village finance implementation, and reporting and accountability of village finance management. Thus, the activities of the PKM have successfully improved the competence of the village device in managing the village's finances, so it is expected to improve the effectiveness and efficiency of the use of the village fund.*

*Keywords: financial management, village fund, Village of Kembahang II*

## PENDAHULUAN

Akibat dari pengesahan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa adalah terdapat dana desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Setiap desa akan menerima tambahan pendapatan dari APBN hingga Rp1 Milyar per tahun sebagai dampak ekonomis

dari terbitnya UU tersebut. Besaran alokasi dana tersebut akan disesuaikan dengan berbagai faktor seperti jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis di setiap desa. Harapannya, Dana Desa akan memberikan dorongan untuk memperkuat dan memajukan desa serta pemberdayaan masyarakat di dalamnya. Namun, dalam mengelola Dana Desa, diperlukan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). *World Bank* dalam Mardiasmo (2002:18), *good governance* diartikan sebagai pengelolaan pembangunan yang kuat dan bertanggung jawab, yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan efisiensi pasar, untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dana investasi dan korupsi, baik secara politik maupun administratif.

Dalam Yuwono (2016) dijelaskan bahwa menerapkan prinsip *good governance* yang baik tidak berarti desa harus meninggalkan aspek tradisionalnya. Desa masih bisa mempertahankan karakter sosial budayanya, namun tetap harus memperhatikan praktik akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi seperti yang ditekankan dalam prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut Abidin (2015) & Prasetyo dan Muis (2015) beberapa hambatan yang ditemui dalam pengelolaan dana desa adalah keterbatasan perangkat desa dalam hal kapasitas dan keberadaan, kurangnya kemandirian keuangan desa, kelemahan dalam perencanaan yang mempengaruhi implementasi dan pelaporan, serta kendala horizontal dan vertikal. Kendala horizontal mengacu pada lemahnya kelembagaan desa dan koordinasi dengan pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota, sementara kendala vertikal adalah birokrasi pengelolaan keuangan desa yang terlalu kaku, kurangnya petunjuk teknis pengelolaan dana desa yang lengkap, dan tumpang tindih kewenangan antara Kemendes dan Kemendagri (Ditjen Bina Pemerintahan Desa). Hambatan-hambatan ini menyebabkan hasil pembangunan di daerah pedesaan belum mencapai potensinya yang sebenarnya.

Tabel 1. Indeks Desa Membangun (IDM) Desa di Kecamatan Pemulutan Barat Tahun 2021

| Wilayah                   | IDM 2021 | Status 2021 |
|---------------------------|----------|-------------|
| Kabupaten Ogan Ilir       | 0.6419   | Berkembang  |
| Kecamatan Pemulutan Barat | 0.5954   | Tertinggal  |
| Suka Merindu              | 0.6316   | Berkembang  |
| Saranglang                | 0.5571   | Tertinggal  |
| Kamal                     | 0.5932   | Tertinggal  |
| Pulau Negara              | 0.5822   | Tertinggal  |
| Seri Banding              | 0.5819   | Tertinggal  |
| Talang Pangeran Ulu       | 0.6748   | Berkembang  |
| Ulak Kembahang I          | 0.6062   | Berkembang  |
| Ulak Petangisan           | 0.5822   | Tertinggal  |
| Talang Pangeran Ilir      | 0.6025   | Berkembang  |
| Ulak Kembahang II         | 0.5814   | Tertinggal  |
| Arisan Jaya               | 0.5559   | Tertinggal  |

Sumber: Kemendes, 2021

Pengelolaan keuangan desa yang efektif adalah pengelolaan yang mematuhi panduan yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti yang diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Hal ini sangat penting dalam mencapai kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di desa. Artinya, bukan karena hanya besar jumlah alokasi dana APBN, tetapi

juga karena kemampuan pengelolaan keuangan yang berbeda-beda di setiap desa yang membuat pengelolaan keuangan desa yang baik dan benar perlu dilakukan. Selain itu, perlu dicatat bahwa setiap tahun dana yang dialokasikan untuk setiap desa dapat meningkat. Hasil analisis menunjukkan bahwa penggunaan Dana Desa untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat masih belum optimal, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan desa. Hal ini dapat dilihat dari data Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2021 pada Tabel 1, dari 13 desa di Kecamatan Pemulutan Barat terdapat 8 desa dengan status Tertinggal termasuk Desa Ulak Kembahang II.

Hasil wawancara dengan masyarakat didapatkan informasi bahwa pada tahap perencanaan penggunaan dana desa, kecenderungan lebih banyak pada program yang akan dilaksanakan berdasarkan rencana kepala desa sehingga pada saat musrenbang desa, partisipasi masyarakat terbatas hanya untuk mendengarkan. Pada tahap pembahasan rencana penggunaan dana desa, hanya beberapa orang yang dihadirkan untuk membahasnya sementara hasil pembahasan tidak diinformasikan secara luas kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak mengetahui bahwa desa menerima dana desa yang besar dari pemerintah. Oleh karena itu, dosen dari Universitas Sriwijaya memberikan bantuan berupa pendampingan pengelolaan keuangan desa agar tercapai pengelolaan keuangan desa yang efektif yaitu pengelolaan yang mematuhi panduan yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti yang diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Hal ini sangat penting dalam mencapai kemajuan pembangunan desa, meningkatkan partisipasi serta kesejahteraan masyarakat.

## METODE

Model kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) dilakukan dengan cara memberikan pendampingan manajemen dan teknis dalam mengelola keuangan desa. Pendampingan ini menggunakan metode sosialisasi dan edukasi, *focus group discussion* (FGD), serta bimbingan teknis. Rangkaian kegiatan PKM terdiri dari empat tahap, yaitu tahap persiapan dimana tim pelaksana melakukan pertemuan awal untuk menyusun proposal dan membagi tugas dan tanggung jawab kegiatan. Melakukan kunjungan I ke desa untuk audiensi dan diskusi identifikasi masalah dan pemecahan masalah; 2) tahap pelaksanaan, pada tahap ini tim pelaksana PKM melakukan FGD awal berupa diskusi dengan peserta tentang pengelolaan keuangan desa kemudian melakukan bimbingan teknis mengenai perencanaan dan penganggaran, penatausahaan keuangan desa, dan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan; 3) tahap evaluasi PKM, pada tahap ini peserta mengisi kuesioner evaluasi; 4) tahap penyusunan luaran PKM, pada tahap ini tim PKM menyusun artikel ilmiah, dan laporan akhir kegiatan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

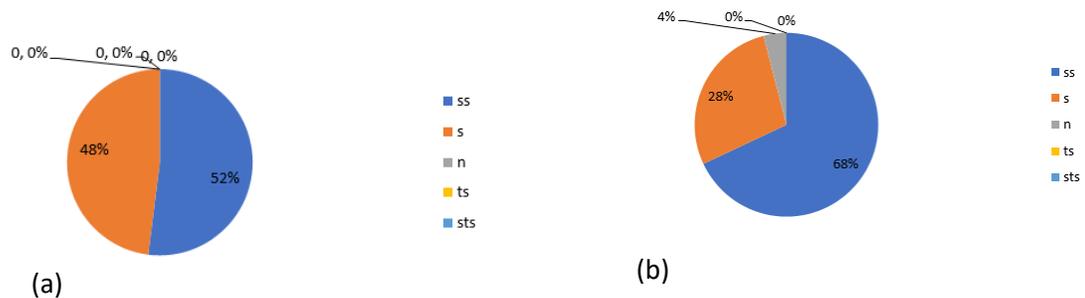
Kegiatan PKM dilakukan melalui empat tahapan antara lain tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi, dan tahap penyusunan luaran PKM. Pada tahap persiapan tim PKM Kunjungan awal ke desa Ulak Kembahang II untuk melakukan diskusi tentang identifikasi masalah dan kerangka pemecahan masalah. Berdasarkan hasil diskusi dengan perangkat desa dan masyarakat diketahui bahwa pemanfaatan dana desa belum optimal dan kurangnya partisipasi masyarakat pada kegiatan

yang dilakukan dari dana desa karena tidak ada transparansi hasil dari pembahasan rencana penggunaan dana desa. Tim PKM kemudian membuat daftar identifikasi masalah dan kerangka pemecahan masalah yang nantinya akan diberikan solusi pada tahap pelaksanaan.



Gambar 1. Identifikasi Masalah dan Kerangka Pemecahan Masalah dan Penyerahan Buku Pengelolaan Keuangan

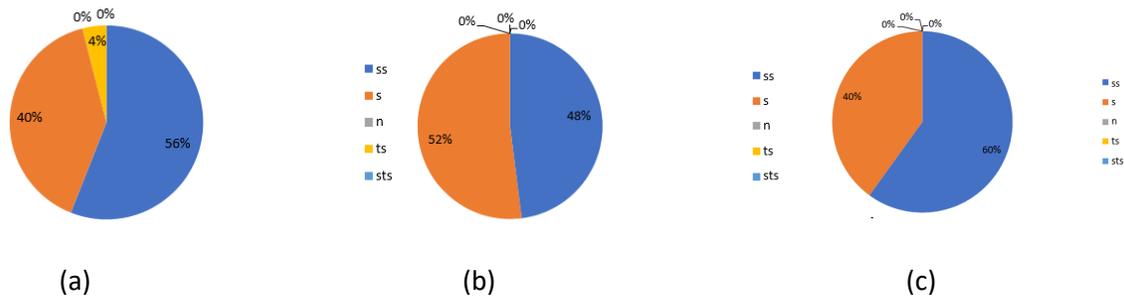
Pada tahap pelaksanaan tim PKM memberikan penyuluhan kepada aparat desa dan masyarakat desa tentang pentingnya pengelolaan keuangan desa sesuai dengan peraturan pemerintah dalam negeri (Pemendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pada tahap pelaksanaan juga dilakukan Bimbingan Teknis tentang pengelolaan keuangan terutama penyusunan laporan keuangan desa dengan aplikasi Siskeudes. Tahap evaluasi dilakukan dengan penyerahan buku materi dan pelatihan dari tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan keuangan desa dan pelaporan serta pertanggungjawaban keuangan desa. Buku diserahkan oleh Ketua Pengabdian Pengelolaan Keuangan Desa kepada Kepala Desa di Laboratorium Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Kampus Indralaya. Buku tersebut terdiri dari 6 buku sebagai berikut: 1) Buku Induk Petunjuk Teknis Operasional Pengelolaan Keuangan Desa, 2) Buku I tentang Perencanaan Keuangan Desa, 3) Buku II Pelaksanaan Keuangan Desa, 4) Buku III Penatausahaan Keuangan Desa, 5) Buku IV Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa, 6) Buku V Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesa Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa.



Gambar 2. Pernyataan Ke-1 Apakah Kegiatan Pelatihan dan Pengabdian Masyarakat Ini Diselenggarakan Tepat Waktu dan Pertanyaan Ke-2 Materi Kegiatan Pelatihan dan Pengabdian Relevan dengan Kegiatan yang dilakukan.

Pada tahap ini juga dilakukan penyebaran angket/kuesioner yang terdiri dari evaluasi ke para peserta yang mengikuti pelatihan dan rangkaian kegiatan pengabdian dan evaluasi kepada masyarakat yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Dari hasil kuesioner yang diberikan kepada peserta sebagai evaluasi, diperoleh respons dari peserta (Gambar 2).

Gambar 3a menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan dan pengabdian masyarakat telah dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan susunan acara yang telah direncanakan, hal ini terlihat dari persentase peserta yang memilih sangat setuju (SS) yaitu 52 persen. Gambar 3b diketahui 68 persen peserta memilih sangat setuju dan 28 peserta memilih setuju materi kegiatan pelatihan dan pengabdian relevan dengan kegiatan yang dilakukan dan 4 persen peserta memilih netral.



Gambar 3. Pertanyaan Ke-3 Pelaksanaan dan Penyampaian Materi Berjalan Secara Efektif, Pertanyaan Ke-4 Efisien dan Materi Yang Diberikan Sesuai Dengan Kebutuhan Peserta dan Pertanyaan Ke-5 Pelaksanaan Praktek/Bimbingan Teknis Dilaksanakan Dengan Baik

Gambar 3a menunjukkan 56 persen dari peserta memilih sangat setuju untuk materi yang disampaikan berjalan dengan efektif. Gambar 3b menunjukkan 48 persen peserta menyatakan bahwa materi yang diberikan oleh para narasumber sesuai dengan kebutuhan peserta dan 52 peserta memilih setuju. Gambar 3c menunjukkan pelaksanaan praktek/bimbingan teknis dilaksanakan dengan baik, dilihat dari pernyataan peserta 60 menyatakan sangat setuju dan 40 persen menyatakan setuju.

Sebagai bentuk evaluasi pemahaman peserta terhadap penyampaian materi pengelolaan keuangan desa yang telah disampaikan oleh pemateri, maka diakhir kegiatan peserta diberikan kuesioner mengenai tingkat pemahaman peserta terhadap pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan hasil kuesioner sebagian peserta menjadi lebih memahami mengenai pengelolaan keuangan desa setelah dilaksanakan kegiatan ini, hal ini dilihat dari rata-rata hasil persentase pemahaman yang berada di atas 78,5 persen untuk 32 butir pertanyaan.

## PENUTUP

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat telah dilaksanakan selama 5 hari kegiatan, di Laboratorium Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Kampus Indralaya. Dengan jumlah peserta sebanyak 25 orang yang terdiri dari aparat desa, LPM, BPD, Karang Taruna dan masyarakat. Dari kegiatan PKM ini, semua peserta dan masyarakat yang terlibat memperhatikan

dengan baik penyampaian materi oleh tim PKM dan dengan adanya kegiatan ini, para peserta menjadi lebih paham mengenai penyusunan keuangan desa. Rata-rata persentase pemahaman peserta sebesar 78,5 persen untuk 32 butir pertanyaan tentang tentang pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan keuangan desa, penganggaran keuangan desa, pelaksanaan keuangan desa, serta pelaporan dan pertanggungjawaban dari pengelolaan keuangan desa.

## REFERENSI

- Abidin, M. Z. (2015). Tinjauan Atas Pelaksanaan Keuangan Desa Dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan*. 6(1), 61-67. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22212/jekp.v6i1.156>
- Bender, D. (2016). DESA - Optimization of variable structure Modelica models using custom annotations. *ACM International Conference Proceeding Series, 18-April-2(1)*, 45–54. <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Prasetyo, A.G., & Muis, A. (2015). Pengelolaan Keuangan Desa Pasca UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa: Pontensi Permasalahan dan Solusi. *Jurnal Desentralisasi*. 13(1), 16-31. <http://dx.doi.org/10.37378/jd.2015.1.16-31>
- Pusat Data Desa Indonesia. *Index Data Membangun*. Diambil kembali dari <https://pddi.kemendesa.go.id/idm>
- Tamani, H., & Agussalim, A. (2019). Transparansi Kepala Desa Dalam Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Inosota Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongodow Selatan. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 6(2), 144–151. <https://doi.org/10.37606/publik.v6i2.16>
- Yuwono, Teguh. (2016). Local Good Governance Sustainability: Roles of Civil Society in Surakarta City, Indonesia. *Jurnal Studi Pemerintahan*. 7(2). 266-287. <https://doi.org/10.18196/jgp.2016.0030>
- Garris Pelangi. (2020). Pemanfaatan Aplikasi Canva Sebagai Media Pembelajaran Bahasa Dan Sastra Indonesia. *Jurnal Sasindo Unpam*, 8(2), 1–18. <http://www.openjournal.unpam.ac.id/index.php/Sasindo/article/view/8354>
- Gata, G., Imelda, I., Yuliazmi, Y., & Siswanto, S. (2020). Pelatihan Pengelolaan Blog Untuk Remaja Di RPTRA Manunggal Kelurahan Petukangan Selatan. *Jurnal Abdimas BSI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 39–44. <https://doi.org/10.31294/jabdimas.v3i1.6706>
- Marlina, S., Hidayatulloh, S., Pangesti, W. E., & Azzahro, F. (2022). Pemanfaatan Google Maps Sebagai Media Visualisasi. *Abditeknika Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 91–98. <https://doi.org/10.31294/abditeknika.v2i2.1319>
- Muhasim, M. (2017). Pengaruh Tehnologi Digital terhadap Motivasi Belajar Peserta Didik. *Palapa*, 5(2), 53–77. <https://doi.org/10.36088/palapa.v5i2.46>
- Ngafifi, M. (2014). Kemajuan Teknologi Dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi*, 2(1), 33–47. <https://doi.org/10.21831/jppfa.v2i1.2616>

## LAMPIRAN

| No | Pernyataan   | Kode | Persentase |
|----|--|------|------------|
| 1  | Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa harus dibuktikan dengan bukti-bukti/dokumen penggunaan anggaran sesuai ketentuan perundang-undang | Q1   | 80         |
| 2  | Laporan yang dibuat merupakan laporan realisasi pelaksanaan APBDes   | Q2   | 72         |
| 3  | Penyusunan laporan pertanggungjawaban memuat realisasi pendapatan,   | Q3   | 68         |
| 4  | tahap pelaporan pemerintah desa selalu mengikuti aturan yang berlaku   | Q4   | 80         |
| 5  | Setiap laporan pertanggungjawaban yang dibuat perangkat desa selalu  | Q5   | 76         |
| 6  | Dalam laporan pertanggungjawaban selalu disertai dengan bukti-bukti  | Q6   | 72         |
| 7  | Laporan pertanggungjawaban dapat dipahami para masyarakat dan unit-  | Q7   | 82         |
| 8  | Laporan realisasi pelaksanaan APBDes yang disajikan oleh pemerintah  | Q8   | 88         |
| 9  | Laporan yang disajikan memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh   | Q9   | 80         |
| 10 | Laporan keuangan yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan oleh   | Q10  | 72         |
| 11 | Pemerintah desa selalu terbuka terhadap masyarakat dalam pelaksanaan   | Q11  | 68         |
| 12 | Pemerintah desa menyediakan media informasi yang dapat   | Q12  | 76         |
| 13 | Dalam pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes pemerintahan desa membuat papan informasi yang dilihat langsung oleh masyarakat          | Q13  | 80         |
| 14 | Laporan pertanggungjawaban yang disampaikan merupakan laporan  | Q14  | 82         |
| 15 | Laporan pertanggung jawaban pemerintah desa menyediakan laporan  | Q15  | 76         |
| 16 | Laporan pertanggungjawaban harus dilengkapi dengan bukti pengadaan   | Q16  | 80         |
| 17 | Laporan pertanggungjawaban yang disediakan oleh pemerintah desa  | Q17  | 84         |
| 18 | Dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemerintah desa  | Q18  | 76         |
| 19 | Proses dan pertanggungjawaban anggaran diawasi secara terus-menerus  | Q19  | 72         |
| 20 | Laporan pertanggungjawaban disusun sesuai dengan ketentuan peraturan   | Q20  | 82         |
| 21 | Laporan pertanggungjawaban dihasilkan melalui prosedur yang sesuai   | Q21  | 84         |
| 22 | Penyusunan laporan pertanggungjawaban memuat informasi yang akurat   | Q22  | 68         |
| 23 | Pelaporan keuangan dibuat dengan standar akuntansi pemerintahan  | Q23  | 72         |
| 24 | Dana yang dipakai selalu dicatat dengan jujur dan transparan   | Q24  | 76         |
| 25 | Laporan pertanggungjawaban harus dilengkapi dengan bukti pengadaan   | Q25  | 80         |
| 26 | Laporan yang dipertanggungjawabkan oleh bendahara sesuai dengan  | Q26  | 80         |
| 27 | Bendahara desa selalu menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada  | Q27  | 96         |
| 28 | Penyajian laporan keuangan disajikan dengan istilah yang mudah   | Q28  | 92         |

|    |   |     |    |
|----|---|-----|----|
| 29 | Adanya informasi kepada masyarakat terkait dengan sisa anggaran   | Q29 | 80 |
| 30 | Pemerintah desa menyiapkan sarana pengaduan masyarakat apabila dalam laporan keuangan desa ada indikasi penyimpangan pengelolaan dana | Q30 | 80 |
| 31 | Pemerintah menanggapi dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat  | Q31 | 80 |
| 32 | Pemerintah desa melibatkan BPD/toko masyarakat dalam proses   | Q32 | 80 |

---